

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini didukung oleh adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pendidikan. Pada Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Aturan tersebut menjadi tujuan diselenggarakannya pendidikan sebagai cita-cita bangsa. Pendidikan yang merata diharapkan mampu memberikan tempat untuk mengembangkan potensi bagi seluruh masyarakat.

Pendidikan sendiri telah ada sejak lama. Mulai dari setingkat PAUD hingga jenjang yang lebih tinggi. Keberadaan pendidikan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan akan membantu program yang telah dijalankan pemerintah. Pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pendidikan khusus dan reguler. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan reguler merupakan pendidikan bagi anak normal. Namun, dengan berjalannya waktu beberapa sekolah reguler ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusif. Sekolah-sekolah reguler ditunjuk berlandaskan pada Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pada pasal 1 Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dijelaskan bahwa dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Lebih lanjut sekolah inklusif telah dijelaskan oleh Kemendikbud (2016:2) bahwa pendidikan inklusif merupakan penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan. Pendidikan inklusif juga mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan umum, akan tetapi cara penerapannya agak berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan inklusif adalah pendidikan terbuka, di mana semua anak yang berkeinginan sekolah bisa melanjutkan ke pendidikan inklusif. Pada pelaksanaan pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).

Kemendikbud (2016:11) siswa dalam pendidikan inklusif sangat beragam karakteristik dan juga jenis ketunaan. Siswa yang dapat diterima dalam pendidikan inklusif adalah siswa normal (siswa reguler) dan siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus yaitu meliputi siswa dengan gangguan penglihatan, siswa dengan gangguan pendengaran, siswa dengan gangguan bicara, siswa dengan gangguan fisik, siswa dengan gangguan kesulitan belajar, siswa dengan gangguan lambat belajar, siswa dengan gangguan pemusatan perhatian, siswa cerdas istimewa, siswa bakat istimewa, dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

Sekolah inklusif mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Kemudian, mulai berkembang tahun 1960-an di Amerika dan berkembang di berbagai belahan dunia. Menurut Garnida (2015:43) Pemerintahan Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem

pendidikan anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem segregasi. Menurut Garnida (2015:47-48) sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di mana tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka agar dapat berinteraksi sosial secara mandiri di lingkungan masyarakatnya. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, sistem segregasi justru dipisahkan dengan lingkungan masyarakatnya, khususnya terjadi di masyarakat. Berangkat dari kenyataan tersebut, lahirlah beberapa konsep pendidikan inklusif.

Proses penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem segregasi justru membuat anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari masyarakat. Sehingga, salah satu tujuan dari sekolah inklusif adalah memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Garnida (2015:43-44) menjelaskan beberapa tujuan dari sekolah inklusif yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Serta, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SPN, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi, “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan

kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan inklusif, mengingat cukup banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Maulipaksi (2017) melaporkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya sekolah inklusif di daerah-daerah. Sebanyak 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusif berjumlah sekitar 299 ribu. Kemendikbud telah menjalankan program sekolah inklusif untuk memberikan akses pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah di SLB. Saat ini terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusif di berbagai daerah.

Keberadaan sekolah inklusif di Indonesia menjadi tantangan bagi semua pihak terutama pada kesiapan pendidik dalam menerapkan sistem sekolah inklusif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan sekolah inklusif akan menimbulkan banyak kendala. Salah satunya adalah dalam mempersiapkan siswa reguler untuk dapat menerima kondisi sistem yang akan diterapkan. Ni'matuzahroh (2015 dalam Kemendikbud, 2016:3) menyimpulkan bahwa penolakan siswa reguler belajar bersama dengan siswa berkebutuhan khusus menjadi kendala di sekolah inklusif. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam sekolah inklusif. Salah satu permasalahan yang dihadapi di sekolah inklusif adalah adanya tindakan *bullying* pada remaja berkebutuhan khusus. Perilaku *bullying* dapat terjadi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Perilaku yang biasa tampak adalah mengejek, mentertawakan, menipu teman, melabeling dan juga mendiskriminasi

(Marlina & Sakinah, 2018:5). Satriadin (2017) melaporkan bahwa telah terjadi kasus *bullying* yang terjadi pada seorang siswi kelas IX di SMP Negeri 4 Nganjuk, Jawa Timur. S adalah anak berkebutuhan khusus, yang mengikuti program sekolah inklusif di SMP tersebut. Pelaku merekam sendiri aksi *bullying*-nya terhadap S, lalu diunggah ke *Instagram Story*.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Marlina & Sakinah (2018:2) di SMKN 7 Padang, menemukan siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut, terdiri dari anak dengan hambatan penglihatan, anak dengan hambatan kecerdasan, serta anak berkesulitan belajar. Selama observasi dilakukan di sekolah ini, telah ditemukan tindakan *bullying* yang dilakukan oleh teman sebaya kepada siswa berkebutuhan khusus. Tindakan yang tampak saat itu adalah mengejek yang dilontarkan teman sebaya kepada anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan Khusumadewi & Sholeha (2017: 236-238), sebanyak 82,86% siswa kelas VII di sekolah inklusif SMPN 4 Waru memiliki pikiran negatif tentang siswa berkebutuhan khusus, mereka berpikiran bahwa siswa berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh, pikirannya kosong, mengganggu, nakal, pemarah, dan berbahaya. Pikiran negatif yang dimiliki siswa reguler berupa penilaian tentang siswa berkebutuhan khusus adalah aneh, nakal, pemarah, dan pikirannya kosong tidaklah benar. Karena, dibalik hal-hal yang terjadi tersebut terdapat perbedaan kondisi siswa berkebutuhan khusus yang tidak diketahui siswa reguler.

Khusumadewi & Sholeha (2017:236-238) menjelaskan bahwa siswa reguler yang berpikiran bahwa siswa berkebutuhan khusus nakal, pemarah, dan berbahaya karena pernah melihat film yang terdapat adegan anak berkebutuhan khusus marah meledak-ledak hingga menyakiti orang di sekitarnya. Selain itu, ia pernah melihat salah satu siswa berkebutuhan khusus dengan jenis autisme mengalami kemarahan yang meledak-ledak. Berdasarkan kejadian tersebut, ia menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang pemarah, nakal, dan berbahaya. Selain itu, mereka berpikiran bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh. Siswa tersebut juga memiliki alasan untuk hal tersebut, karena siswa tersebut pernah melihat temannya berbicara dengan siswa

berkebutuhan khusus dengan jenis autisme yang tidak dapat berbicara dengan menatap mata lawan bicara. Sehingga, ia berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh. Siswa reguler yang berpikiran negatif bahwa anak berkebutuhan khusus pikirannya kosong, karena ia melihat siswa berkebutuhan khusus dengan jenis lambat belajar merespon dengan lambat jika diajak berbicara dan terlihat pasif saat proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus pikirannya kosong. Siswa reguler yang berpikiran negatif bahwa anak berkebutuhan khusus agak mengganggu, karena ia pernah duduk di dekat siswa lambat belajar. Terkadang siswa lambat belajar bertanya kepadanya saat guru sedang menjelaskan. Sehingga, ia berpikiran bahwa anak berkebutuhan khusus mengganggu. Selain itu, siswa reguler yang sering melihat orang yang lumpuh, buta, tidak mempunyai kaki atau tangan menjadi pengemis, berpikiran bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang lemah. Padahal, belum tentu semua anak berkebutuhan khusus menjadi pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekacauan pola pikir yang bersifat melebih-lebihkan tentang ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus. Hal inilah yang disebut dengan pikiran negatif.

Beberapa dampak dari pikiran negatif antara lain dapat menimbulkan rasa cemas, takut, benci, menuduh, menghujat, dan menghakimi (Mutiar, 2013 dalam Khusumadewi & Sholeha, 2017:238). Lebih lanjut, ditemukan beberapa bentuk perilaku siswa reguler sebagai akibat dari pikiran negatif tersebut. Terdapat kecenderungan siswa reguler untuk menjauhi siswa berkebutuhan khusus dengan jenis lambat belajar di kelas tersebut. Ketika siswa lambat belajar mendekati sekelompok siswa reguler yang sedang mengobrol, mereka pergi dan menghindarinya. Ketika duduk bersebelahan dengan siswa lambat belajar, salah satu siswa reguler tidak bersedia meminjamkan alat tulis ketika siswa lambat belajar membutuhkan dengan alasan takut jika nanti rusak. Salah satu dari siswa reguler di kelas tersebut juga suka memarahi siswa lambat belajar di kelas tersebut tanpa sebab yang jelas. Terdapat dua siswa reguler menggunakan sebutan “ABK” untuk memberikan julukan kepada siswa reguler yang suka mengganggu

temannya di kelas. Tentunya, hal ini dilakukan siswa reguler tanpa sepengetahuan guru (Khusumadewi & Sholeha, 2017:238).

Bullying dan pikiran negatif merupakan reaksi siswa reguler akan keberadaan siswa berkebutuhan khusus sehingga menimbulkan perilaku menjauhi membenci, melabelling bahkan diskriminasi. Reaksi tersebut merupakan penyesuaian diri yang salah. Hal ini dijelaskan oleh Fatimah (2010:197-198) ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Adapun bentuk khusus reaksi bertahan yaitu rasionalisasi, represi, proyeksi dan *sour grapes* (anggur kecut). Kedua, reaksi menyerang yaitu selalu membenarkan diri sendiri, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi, merasa senang bila mengganggu orang lain, suka menggertak, baik dengan ucapan maupun perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, bersikap menyerang dan merusak, keras kepala dalam sikap dan perbuatannya, suka bersikap balas dendam, memerkosa hak orang lain, tindakannya suka serampangan, dan sebagainya. Ketiga, reaksi melarikan diri (*escape reaction*) yaitu individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya.

Reaksi menyerang menggambarkan keadaan yang sesuai dengan perilaku-perilaku *bullying* dan pikiran negatif yang ditimbulkan. Reaksi menyerang memberikan beberapa penjelasan dengan adanya beberapa perilaku yang merugikan orang lain. Sejalan dengan Coloroso (2003 dalam Nasution, 2017:550) *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Sedangkan, pikiran negatif menurut Mutiara (2013 dalam Khusumadewi & Sholeha, 2017:238) dari pikiran negatif akan berdampak antara lain dapat menimbulkan rasa cemas, takut, benci, menuduh, menghujat, dan menghakimi.

Desmita (2014:193) menjelaskan bahwa setiap individu memberikan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu sesuai dengan proses pendekatan yang digunakannya. Seseorang mungkin dapat bereaksi tanpa adanya beban, tetapi orang lain mungkin menganggapnya sebagai situasi yang

membebani atau mengancamnya. Adanya perbedaan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana orang mempersepsi, menilai, dan mengevaluasi situasi yang dihadapinya. Persepsi, penilaian dan evaluasi terhadap realitas inilah yang disebut sebagai realitas individu.

Saat mempersepsikan suatu situasi, individu akan membuat sejumlah asumsi tentang dirinya, tentang dunia di luar dirinya dan tentang relasi dirinya dengan dunia di luar dirinya melalui *self system* yang dimilikinya. *Self system* ini diperoleh dari rentang hidupnya. Menurut Voleman (1971 dalam Desmita, 2014:194), berfungsinya *self system* pada seseorang melibatkan asumsi-asumsi yang dibuat sendiri oleh individu yang bersangkutan. Asumsi-asumsi inilah yang akhirnya membentuk *frame of reference* yang merupakan suatu pandangan yang menetap pada diri individu dalam hubungannya dengan lingkungan, serta merupakan hal penting untuk mengarahkan tingkah laku individu tersebut (Desmita, 2014:194).

Perasaan cemas, takut, benci, menuduh, menghujat, dan menghakimi timbul karena kurangnya pengetahuan siswa reguler tentang anak berkebutuhan khusus tentang perbedaan kondisi yang dialami. Siswa reguler merasa bahwa keberadaan siswa berkebutuhan khusus dapat mengancam dan mengganggu keberadaan siswa reguler. Sejalan dengan Baum (1985 dalam Desmita 2014:193) mengatakan bahwa tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stress, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang.

Bullying dan pikiran negatif merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penyesuaian diri siswa sekolah inklusif. Siswa reguler dituntut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Fatimah (2010:203) mengatakan bahwa lingkungan sekolah berperan sebagai media sosialisasi, yaitu memengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral anak-anak. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis akan memengaruhi proses dan pola penyesuaian diri para siswanya.

Desmita (2014:191) mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi

individu terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Lebih lanjut, Fahmi (1982:14) mengatakan bahwa penyesuaian diri dalam ilmu jiwa adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuannya agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungannya. Batasan dari penyesuaian diri tersebut adalah kemampuan untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dan lingkungannya. Sobur (2013:538) mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang sulit. Pertama, banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri bersumber pada diri sendiri. Kedua, pengaruh-pengaruh yang membentuk kepribadian, berada di luar diri, demikian pula banyak sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ini menimbulkan tuntutan lahir yang harus dipenuhi supaya diri dapat merasa bahagia. Ketiga, usaha-usaha diri untuk memenuhi keperluan dalam dan tuntutan luar dari lingkungan itu harus sesuai dengan tujuan hidup.

Tuntutan penyesuaian diri ini akan meningkat setelah anak beranjak usia remaja. Usia remaja merupakan usia dimana penyesuaian diri merupakan tugas perkembangan tersulit. Hal ini didukung oleh pendapat Hurlock (1980:213) yang menyatakan bahwa yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik (*well adjusted person*) jika mampu melakukan respons-respons yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Dikatakan efisien artinya mampu melakukan respons dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sehemat mungkin. Dikatakan sehat artinya bahwa respons-respons yang dilakukannya sesuai dengan hakikat individu, lembaga, atau kelompok antarindividu, dan hubungan antarindividu dengan penciptanya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sifat sehat ini adalah gambaran karakteristik yang paling menonjol untuk melihat atau menentukan bahwa suatu penyesuaian diri itu dikatakan baik (Ali & Asrori, 2012:176).

Kemampuan penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasyarat yang penting bagi terciptanya kesehatan jiwa/mental individu. Banyak individu yang menderita dan tidak mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan maupun masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami stress atau depresi akibat kegagalan mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan yang ada dan kompleks (Fatimah, 2010:193).

Kemampuan penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut telah dijelaskan oleh Fatimah (2010:199-203) yaitu faktor fisiologi, faktor psikologis, faktor perkembangan dan kematangan, faktor lingkungan dan faktor budaya dan agama. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyesuaian diri. Beberapa faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan penyesuaian diri yaitu faktor pengalaman, faktor belajar, determinasi diri, dan faktor konflik.

Berkaitan erat dengan penyesuaian diri adalah bahwa sesungguhnya individu itu sendiri harus mampu menentukan dirinya sendiri untuk melakukan proses penyesuaian diri. Ini menjadi penting karena determinasi diri merupakan faktor yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, untuk mencapai penyesuaian diri secara tuntas, atau bahkan untuk merusak diri sendiri (Ali & Asrori, 2012:185). Kemampuan menentukan diri sendiri ini disebut determinasi diri (Chaplin, 2011:452).

Determinasi diri merupakan salah satu faktor psikologis dari penyesuaian diri yang memiliki kecenderungan mempengaruhi penyesuaian diri. Fatimah (2010:200) menyebutkan bahwa determinasi diri mempunyai fungsi penting dalam proses penyesuaian diri karena berperan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya meskipun sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya.

Wehmeyer (1996:22) menjelaskan bahwa determinasi diri bertindak sebagai perantara penyebab utama dalam kehidupan seseorang, membuat pilihan, dan membuat keputusan mengenai kualitas hidup seseorang yang bebas dari pengaruh eksternal yang tidak semestinya atau campur tangan dari luar. Maka, keputusan/tindakan berada pada individu itu sendiri. Tidak terkecuali, pada siswa reguler sekolah inklusif. Setiap tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari keputusan yang telah dipilih. Di dalam pelaksanaan sekolah inklusif, siswa reguler akan menentukan perilakunya terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Tindakan tersebut dapat melanggar norma yang ada ataupun sebaliknya.

Siswa reguler dituntut untuk dapat mengadakan penyesuaian diri secara harmonis. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Selain dituntut dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya, siswa reguler dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Penyesuaian diri menuntut remaja untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa puas terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungannya.

Usaha dalam membangun pribadi remaja sekolah inklusif yang sehat dan mampu membuat keputusan secara mandiri dalam bertindak dan bertanggungjawab atas keputusan tersebut maka dibutuhkan determinasi diri yang baik. Power (dalam Mamahit, 2014:93) berpendapat bahwa determinasi diri dapat direfleksikan sebagai penguasaan diri sendiri atau kontrol diri, berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan, dan kemampuan memimpin diri sendiri untuk menggapai tujuan hidup pribadi yang bernilai.

Determinasi diri dapat meningkatkan penyesuaian diri positif. Menurut Fatimah (2010:195) mengatakan bahwa karakteristik penyesuaian diri yang positif yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah, tidak menunjukkan frustrasi pribadi, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri, mampu belajar dari pengalaman, dan bersikap realistis dan objektif.

Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian pada remaja sekolah inklusif dengan melihat hubungan determinasi diri terhadap kemampuan penyesuaian diri pada siswa reguler di sekolah inklusif X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat hubungan determinasi diri terhadap kemampuan penyesuaian diri pada siswa reguler di sekolah inklusif X.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan determinasi diri terhadap kemampuan penyesuaian diri pada siswa reguler di sekolah inklusif X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi bahan pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi pendidikan, psikologi remaja, dan psikologi perkembangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Subyek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan subjek lebih memahami tentang pentingnya determinasi diri terhadap kemampuan penyesuaian diri pada siswa reguler sekolah inklusif dalam memutuskan keputusan/tindakan yang akan diambil/dilakukan.

b. Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi orang tua akan pentingnya determinasi diri terhadap kemampuan penyesuaian diri anak dalam pengambilan keputusan/tindakan.

c. Instansi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi pihak-pihak terkait akan pentingnya penyesuaian diri pada siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah inklusif.

d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian terkait, sehingga bisa mengungkap masalah yang lebih mendetail mengenai permasalahan lain yang menjadi faktor kemampuan penyesuaian diri.